

KATALOG : 4601001.8202

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN TAHUN 2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN TAHUN 2021



**STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2021**

ISBN:-

No. Publikasi: 82020.2224

Katalog: 4601001.8202

Ukuran Buku: 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: xii + 36

Naskah: Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Penyunting: Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Desain Cover: Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Ilustrasi Cover: Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Diterbitkan Oleh: ©Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Dicetak Oleh: Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Ahmad Abdurrahman, SST

Penanggung Jawab Umum:

Ahmad Abdurrahman, SST

Penanggung Jawab Teknis:

Ahmad Abdurrahman, SST

Penyunting:

Krismonita, S.Tr.Stat.

Penulis:

Radita Nareswari M.P., S.Tr.Stat.

Pengolah Data:

Radita Nareswari M.P., S.Tr.Stat.

Desain:

Radita Nareswari M.P., S.Tr.Stat.

Kata Pengantar

Politik dan keamanan merupakan dua hal yang selalu terkait dan saling memengaruhi. Perkembangan politik dan keamanan yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantauan dan monitoring. Ini artinya, diperlukan alat untuk memantau dan memonitor perkembangan situasi politik dan keamanan. Karena itu, diperlukan adanya data yang dapat menggambarkan perkembangan antar waktu dan wilayah.

Buku ini disusun dalam rangka menangkap fenomena politik dan keamanan yang sedang hangat di masyarakat. Semoga buku ini dapat membantu untuk melakukan analisis dalam penyusunan kebijakan bidang politik dan keamanan di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah.

Weda, November 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Halmahera Tengah

Ahmad Abdurrahman, SST

Daftar Isi

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar | v |
| Daftar Isi | vii |
| Daftar Tabel | ix |
| Daftar Gambar | xii |
| BAB I | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 3 |
| 1.2. Tujuan..... | 5 |
| 1.3. Ruang Lingkup..... | 5 |
| BAB II..... | 7 |
| 2.1. Sumber Data | 9 |
| 2.2. Konsep dan Definisi | 9 |
| 2.3. Penjelasan Teknis | 12 |
| BAB III | 13 |
| 3.1. DPRD | 15 |
| 3.2. Organisasi Masyarakat | 17 |
| BAB IV | 19 |
| 4.1. Jumlah Kantor Polisi dan Jumlah Personel Polisi | 21 |
| 4.2. Indikator Utama Kejahatan dan Jenis Kejahatan | 23 |
| LAMPIRAN | 31 |

Daftar Tabel

| | |
|---|----|
| Tabel 1 Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2021 | 15 |
| Tabel 2 Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang Dihasilkan DPRD, 2018-2020 | 16 |
| Tabel 3 Jumlah Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang Terdaftar di Baskebangpol, 2018-2020 | 18 |
| Tabel 4 Jumlah Kantor Polisi Di Provinsi atau Kabupaten Halmahera Tengah, 2018-2020 | 21 |
| Tabel 5 Jumlah Personel Polisi Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Halmahera Tengah, 2018-2020 | 22 |
| Tabel 6 Jumlah Kejadian Kejahatan (Lapor dan Selesai) di Kabupaten Halmahera Tengah, 2019-2020 | 26 |
| Tabel 7 Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Halmahera Tengah, 2019-2020 | 28 |

Daftar Gambar

| | |
|---|----|
| Gambar 1 Jumlah Kejahatan yang Tercatat Dilaporkan dan yang Diselesaikan oleh Kepolisian Halmahera Tengah, 2019-2020..... | 24 |
|---|----|

<https://halmengkab.bps.go.id>

BAB I
PENDAHULUAN

<https://himpeng.umsbps.go.id>

1.1. Latar Belakang

Dimulainya orde reformasi membuat pemerintah melakukan reformasi secara menyeluruh pada elemen pemerintahan. Reformasi tersebut dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan dan penegakkan sistem pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan (*Good and Clean Governance*). Namun, keberhasilan reformasi tersebut masih belum terlihat menyeluruh pada semua bidang pemerintahan. Reformasi birokrasi yang dilakukan khususnya di bagian penegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) melibatkan 4 (empat) lembaga negara/kementerian sekaligus, yaitu Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan, Pengadilan, dan Kementerian Hukum dan HAM (Menhukham).

Keberhasilan reformasi di bidang penegakkan hukum dan HAM pada gilirannya nanti akan mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Rasa aman bagi masyarakat merupakan salah satu kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh pemerintah karena sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah tidak mungkin menyatakan bahwa masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat masih diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman terhadap jiwa, harta, dan kehormatan. Pernyataan tersebut sesuai dengan Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa “.....Pemerintah

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.....”.

Perkembangan demokrasi yang semakin positif membuat permasalahan politik menjadi sesuatu yang dinamis. Kebebasan masyarakat untuk berserikat, berkumpul, beraspirasi, berpendapat, dan menentukan sikap dalam berpolitik telah dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari dinamika jumlah partai politik peserta pemilu dan sikap masyarakat terhadap pemilu. Pemilu pada awal reformasi tahun 1999 yang dilaksanakan secara nasional, terdapat 48 partai yang bergabung. Sedangkan pada tahun 2004 dan 2009 sebanyak 24 dan 28 partai politik.

Politik dan Keamanan merupakan dua hal yang saling berkaitan dan berpengaruh satu sama lain. Politik memengaruhi keamanan dan sebaliknya, keamanan melahirkan ide-ide kebijakan politik. Politik dan Keamanan yang semakin dinamis belakangan ini memerlukan alat untuk memantau atau memonitor perkembangan situasinya. Karena itu, diperlukan adanya data yang dapat menggambarkan kondisi politik dan keamanan antar waktu dan wilayah.

Pemenuhan data tersebut dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dengan menerbitkan publikasi statistik politik, statistik kriminal, dan statistik penegakan. Dengan adanya publikasi ini, diharapkan dapat menjadi alat untuk menggambarkan kondisi perkembangan situasi politik dan keamanan antar waktu dan wilayah. Informasi yang terdapat pada publikasi-publikasi tersebut

diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penentuan kebijakan di bidang politik dan keamanan.

1.2. Tujuan

Kegiatan penyusunan statistik politik dan keamanan, bertujuan untuk:

- menghimpun data statistik politik dan keamanan,
- memberikan gambaran mutakhir perkembangan situasi bidang politik dan keamanan,
- memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar waktu dan wilayah.

1.3. Ruang Lingkup

Publikasi ini mencakup data-data yang terkait dengan keadaan politik dan keamanan di Kabupaten Halmahera Tengah.

BAB II

METODOLOGI

<https://halungku.bps.go.id>

2.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil kompilasi dari registrasi/catatan berbagai instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang meliputi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik (Bakesbangpol), dan Polda/Polres. Dalam proses pengumpulan data, digunakan dua instrumen yaitu kuesioner dan rancangan (*dummy*) tabel.

2.2. Konsep dan Definisi

Mengingat terdapat beragam terminologi yang digunakan dalam publikasi ini, diperlukan penjelasan mengenai konsep-konsep yang digunakan. Penjelasan ini akan membantu pemahaman pembaca terhadap konsep dan data-data yang ditampilkan dalam publikasi ini.

2.2.1 Statistik Politik

Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan politik dengan cara memengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik.

2.2.2 Statistik Keamanan

Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan politik dengan cara memengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik.

Tindak Kejahatan (Kriminalitas) atau Pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Peristiwa yang Dilaporkan adalah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polisi, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.

Peristiwa yang Diselesaikan oleh Kepolisian :

- Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
- Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.

- Peristiwa yang telah diselesaikan oleh Kepolisian berdasarkan asas *plichmatigheid*.
- Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.
- Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- Peristiwa yang telah kedaluwarsa.

Pelaku Kejahatan :

- Orang yang melakukan kejahatan.
- Orang yang turut melakukan kejahatan.
- Orang yang menyuruh melakukan kejahatan.
- Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.
- Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.

2.3. Penjelasan Teknis

Persentase Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (*Clearance Rate*) merupakan statistik yang menyatakan persentase penyelesaian tindak pidana oleh polisi. Angka ini dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Clearance Rate} = \frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah tindak pidana pada tahun } t} \times 100$$

Semakin besar angka penyelesaian tindak pidana menunjukkan semakin besar tindak pidana yang berhasil diselesaikan oleh polisi.

Risiko Penduduk Mengalami Tindak Kejahatan (*Crime Rate*) merupakan statistik yang mengindikasikan peluang penduduk berisiko mengalami tindak pidana. Angka ini dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Crime Rate} = \frac{\text{jumlah tindak pidana pada tahun } t}{\text{jumlah penduduk pada tahun } t} \times k$$

k = Konstanta, biasanya dinyatakan dalam 100.000 atau 1.000

Semakin kecil nilai *crime rate* menunjukkan indikasi yang baik sebab semakin kecil risiko penduduk mengalami tindak pidana.

BAB III
STATISTIK POLITIK

<https://halvingkebps.go.id>

3.1. DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Berdasarkan hasil Pemilu 2019, jumlah anggota parlemen tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1 Jumlah Anggota DPRD Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2021

| Asal Partai Politik | Jumlah anggota | | |
|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Partai Golongan Karya | 6 | 0 | 6 |
| Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 4 | 1 | 5 |
| Partai Nasional Demokrat | 3 | 0 | 3 |
| Partai Gerakan Indonesia Raya | 2 | 0 | 2 |
| Partai Hati Nurani Rakyat | 2 | 0 | 2 |
| Partai Bulan Bintang | 2 | 0 | 2 |
| Jumlah | 19 | 1 | 20 |

Sumber: DPRD Kabupaten Halmahera Tengah

Berdasarkan Tabel 2 di bawah, jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan DPRD pada tahun 2018 ada sebanyak 8 peraturan. Sedangkan tahun 2019 dan 2020, terdapat 10 dan 8 peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD. Tidak ada Peraturan Daerah Inisiatif (Prakarsa) DPRD pada tahun 2018 dan 2020, sedangkan pada tahun 2019 terdapat 3 Peraturan Daerah Inisiatif (Prakarsa) DPRD.

Tabel 2 Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang Dihasilkan DPRD, 2018-2020

| Keterangan | Tahun | | |
|---|-------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Jumlah Peraturan Daerah | 9 | 10 | 8 |
| Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif (Prakarsa) DPRD | 0 | 3 | 0 |

Sumber: DPRD Kabupaten Halmahera Tengah

3.2. Organisasi Masyarakat

Organisasi menjadi salah satu wadah untuk masyarakat dalam bersosialisasi serta berpendapat. Kecenderungan masyarakat untuk berorganisasi merupakan salah satu kebebasan dasar manusia yang diakui secara universal sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kemerdekaan dalam berserikat inilah yang dapat membantu individu mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya yang dapat dilakukan lewat organisasi.

Organisasi masyarakat merupakan suatu kelompok yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan atau mewakili kepentingan tertentu. Seorang individu memiliki peran kecil pada suatu negara utamanya yang memiliki penduduk berjumlah besar. Namun apabila individu tersebut bergabung pada suatu organisasi, organisasi tersebut akan mewakili pendapat dari individu tersebut.

Membedakan antara organisasi dengan partai politik dapat dilihat dari tujuannya. Organisasi biasanya berusaha memengaruhi kebijakan pemerintah, namun tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Sebaliknya, partai politik bertujuan untuk menguasai jabatan publik, yaitu jabatan politik maupun pemerintahan. Sekalipun demikian, organisasi terkadang berkembang menjadi partai politik.

Pasca Orde Baru, kebebasan masyarakat untuk berorganisasi terbuka sangat lebar. Setiap individu berhak untuk berserikat atau mendirikan organisasi kemasyarakatan tanpa adanya intervensi oleh pemerintah. Banyak organisasi masyarakat yang muncul dan

tidak sedikit organisasi tersebut yang tidak terdaftar secara legal di pemerintah pusat maupun daerah.

Tabel berikut menunjukkan jumlah organisasi masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terdaftar di Kabupaten Halmahera Tengah:

Tabel 3 Jumlah Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang Terdaftar di Baskebangpol, 2018-2020

| | Tahun | | |
|---------------------|-------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Mendaftar Tahun Ini | 4 | 2 | 7 |
| Total Terdaftar | 32 | 36 | 43 |

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Halmahera Tengah

Dapat dilihat pada Tabel 3 bahwa di tahun 2020 ada 7 Ormas/LSM yang mendaftar, sedangkan ada sebanyak 43 Ormas/LSM yang terdaftar di Bakesbangpol Kabupaten Halmahera Tengah. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di tahun 2019 lebih sedikit yaitu 2 Ormas/LSM yang mendaftar dan ada sebanyak 36 Ormas/LSM yang terdaftar.

BAB IV
STATISTIK KEAMANAN

<https://halte-kampus.go.id>

4.1. Jumlah Kantor Polisi dan Jumlah Personel Polisi

Jumlah kantor polisi di Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2020 ada 1 polres, 3 polsek dan 1 pos polisi. Terdapat pengurangan jumlah pos polisi pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Tabel 4 Jumlah Kantor Polisi Di Provinsi atau Kabupaten Halmahera Tengah, 2018-2020

| Keterangan | Tahun | | |
|------------------------|-------|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Jumlah Polres/Polresta | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah Polsek/Polsekta | 3 | 3 | 3 |
| Jumlah Pos Polisi | 1 | 6 | 1 |

Sumber: Polres Halmahera Tengah

Jumlah personel polisi laki-laki dari tahun 2018 hingga 2020 secara keseluruhan mengalami peningkatan, dari sebanyak 267 personel di tahun 2018 menjadi 277 personel di tahun 2020. Namun, jumlah personel polisi perempuan mengalami penurunan di tahun 2020.

Tabel 5 Jumlah Personel Polisi Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Halmahera Tengah, 2018-2020

| Keterangan | Tahun | | |
|--------------|------------|------------|------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Laki-Laki | 267 | 272 | 277 |
| Perempuan | 7 | 7 | 6 |
| Total | 273 | 279 | 283 |

Sumber: Polres Halmahera Tengah

4.2. Indikator Utama Kejahatan dan Jenis Kejahatan

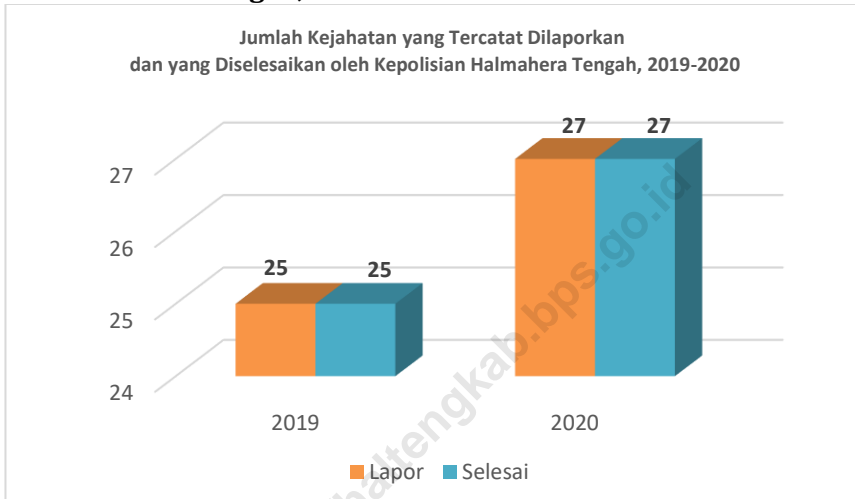
Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan secara umum adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*). Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan (*crime total*) adalah peristiwa yang dilaporkan yaitu setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat atau peristiwa yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi. Biasa disebut oleh pihak kepolisian sebagai **Jumlah Laporan**. Sementara itu, jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan (*Crime Cleared*) sering kali disebut pihak kepolisian sebagai **Jumlah Kasus Selesai**.

Suatu tindak pidana dinyatakan sebagai kasus yang selesai di tingkat kepolisian, apabila:

- Berkas perkaranya sudah siap untuk diserahkan atau telah diserahkan kepada kejaksaan (P21)
- Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang
- Telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan asas *Plichtmatigheid* (kewajiban berdasarkan kewenangan hukum)
- Kasus yang dimaksud tidak termasuk kompetensi Kepolisian;
- Tersangka meninggal dunia/gila
- Kasus kedaluwarsa, dan sebagainya.

Indikator kejahatan selama periode 2019 – 2020 disajikan pada gambar berikut:

Gambar 1 Jumlah Kejahatan yang Tercatat Dilaporkan dan yang Diselesaikan oleh Kepolisian Halmahera Tengah, 2019-2020



Sumber: Polres Halmahera Tengah

Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat bahwa jumlah kejahatan yang dilaporkan (*crime total*) dan jumlah kejahatan yang diselesaikan (*crime cleared*) dari tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan. Pada kedua tahun tersebut, kasus yang dilaporkan dapat secara keseluruhan diselesaikan oleh pihak kepolisian. Pada tahun 2019, terdapat 25 laporan kejahatan yang tercatat dan laporan tersebut diselesaikan seluruhnya oleh pihak kepolisian. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2020, terdapat 27 laporan yang tercatat dan seluruh laporan tersebut dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian.

<https://haltengkab.bps.go.id>

Tabel 6 Jumlah Kejadian Kejahatan (Lapor dan Selesai) di Kabupaten Halmahera Tengah, 2019-2020

| No. | Kelompok Kejahatan | 2019 | | 2020 | |
|--|---|-------|---------|-------|---------|
| | | Lapor | Selesai | Lapor | Selesai |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Kejahatan terhadap Nyawa | | | | | |
| 1 | Pembunuhan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kejahatan terhadap Fisik/Badan | | | | | |
| 2 | Penganiayaan Ringan | 12 | 12 | 5 | 5 |
| 3 | Penganiayaan Berat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kekerasan dalam Rumah Tangga | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Kejahatan terhadap Kesusilaan | | | | | |
| 5 | Perkosaan | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Pencabulan | 1 | 1 | 7 | 7 |
| Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang | | | | | |
| 7 | Penculikan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mempekerjakan Anak Dibawah Umur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan | | | | | |
| 9 | Pencurian dengan Kekerasan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pencurian dengan Kekerasan dengan Menggunakan Senjata Api (Senpi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang | | | | | |
| 12 | Pencurian | 3 | 3 | 10 | 10 |
| 13 | Pencurian dengan pemberatan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pencurian Kendaraan Bermotor | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Pengrusakan/Penghancuran Barang | 1 | 1 | 1 | 1 |

| No. | Kelompok Kejahatan | 2019 | | 2020 | |
|--|----------------------------|-------|---------|-------|---------|
| | | Lapor | Selesai | Lapor | Selesai |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 16 | Pembakaran dengan Sengaja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Penadahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kejahatan Terkait Narkotika | | | | | |
| 18 | Narkotika dan Psikotropika | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi | | | | | |
| 19 | Penipuan/Perbuatan Curang | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Penggelapan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Korupsi | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum | | | | | |
| 22 | Terhadap Ketertiban Umum | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber: Polres Halmahera Tengah

Tabel 7 Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Halmahera Tengah, 2019-2020

| No. | Kelompok Kejahatan | 2019 | | 2020 | |
|--|---|------|-----|------|-----|
| | | L | P | L | P |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Kejahatan terhadap Nyawa | | | | | |
| 1 | Pembunuhan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kejahatan terhadap Fisik/Badan | | | | | |
| 2 | Penganiayaan Ringan | 11 | 1 | 5 | 0 |
| 3 | Penganiayaan Berat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kekerasan dalam Rumah Tangga | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Kejahatan terhadap Kesusilaan | | | | | |
| 5 | Perkosaan | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Pencabulan | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang | | | | | |
| 7 | Penculikan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mempekerjakan Anak Dibawah Umur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan | | | | | |
| 9 | Pencurian dengan Kekerasan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pencurian dengan Kekerasan dengan Menggunakan Senjata Api (Senpi) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang | | | | | |
| 12 | Pencurian | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 13 | Pencurian dengan pemberatan | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No. | Kelompok Kejahatan | 2019 | | 2020 | |
|--|---------------------------------|------|-----|------|-----|
| | | L | P | L | P |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 14 | Pencurian Kendaraan Bermotor | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pengrusakan/Penghancuran Barang | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Pembakaran dengan Sengaja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Penadahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kejahatan Terkait Narkotika | | | | | |
| 18 | Narkotika dan Psikotropika | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi | | | | | |
| 19 | Penipuan/Perbuatan Curang | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Penggelapan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Korupsi | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum | | | | | |
| 22 | Terhadap Ketertiban Umum | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber: Polres Halmahera Tengah

Selama kurun 2019 – 2020, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Kabupaten Halmahera Tengah cenderung mengalami kenaikan. Laporan yang dihimpun dari Kepolisian Resor (Polres) Halmahera Tengah memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada tahun 2019 sebanyak 25 kasus, sedangkan pada tahun 2020 ada sebanyak 27 kasus.

Dari segi jumlah kejahatan, pada tahun 2019 jenis kejahatan yang paling banyak terjadi adalah kelompok kejahatan terhadap penganiayaan ringan. Ada sebanyak 12 kasus yang dilaporkan dan seluruh kasus tersebut telah selesai. Selain itu, kelompok kejahatan

yang terbanyak pada tahun 2019 selain penganiayaan ringan adalah pencurian ada sebanyak 3 kasus yang dilaporkan dan seluruh kasus tersebut telah selesai.

Sementara itu, pada tahun 2020, jenis kejahatan yang paling banyak terjadi adalah kelompok kejahatan pencurian. Ada sebanyak 10 kasus yang dilaporkan dan seluruh kasus tersebut telah selesai. Selain itu, kelompok kejahatan yang terbanyak pada tahun 2020 selain pencurian adalah pencabulan ada sebanyak 7 kasus yang dilaporkan dan seluruh kasus tersebut telah selesai.

Dari Tabel 6, dapat dilihat korban kejahatan berdasarkan jenis kelamin. Pada tahun 2020, korban pencurian dengan jenis kelamin laki-laki ada 10 orang, sedangkan pada tahun 2019 hanya 2 orang. Kejahatan pencabulan pada tahun 2020 dan 2019, seluruh korbannya adalah perempuan yaitu sebanyak 7 dan 1 orang.

LAMPIRAN

<https://haltenyab.bps.go.id>



POLKAM-2021

Dibuat 2 (dua) rangkap untuk :

1. BPS Pusat
2. Arsip

REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

**KUESIONER
STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN 2021**

RAHASIA

| I. KETERANGAN UMUM | | | |
|--------------------|--|------------------------------|--|
| 1. | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ¹⁾ | | <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 2. | JUMLAH KABUPATEN/KOTA ²⁾ | (HANYA DIISI UNTUK PROVINSI) | <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 3. | JUMLAH KECAMATAN | | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 4. | JUMLAH DESA/KELURAHAN/NAGARI ¹⁾ | | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |

Catatan : *) coret yang tidak perlu

| II. KETERANGAN PETUGAS | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. | NAMA PETUGAS |
| 2. | NIP PETUGAS |
| 3. | NO HP PETUGAS |
| 4. | WAKTU PENDATAAN s/d |
| 5. | TANDA TANGAN |
| 6. | NAMA PENGAWAS |
| 7. | NIP PENGAWAS |
| 8. | NO HP PENGAWAS |
| 9. | TANDA TANGAN |

| III. POLITIK | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------|-----------|-------|
| A. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) | | | | | |
| 1. | Jumlah anggota DPRD menurut asal partai politik dan jenis kelamin tahun 2020: | | | | |
| | No. | Asal Partai Politik | Laki-laki | Perempuan | Total |
| | 1 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| | Jumlah | | | | |
| 2. | Jumlah Peraturan daerah (Perda) yang dihasilkan DPRD | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | a. Jumlah Peraturan Daerah | | | | |
| | b. Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif (Prakarsa) DPRD | | | | |
| B. PEMERINTAH DAERAH (PEMDA) | | | | | |
| 3. | Jumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas)/lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terdaftar di Bakesbangpol | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | a. Mendaftar Tahun Ini | | | | |
| | b. Total terdaftar | | | | |

| IV. STATISTIK KEAMANAN | | | | |
|------------------------|---|-------|-------|-------|
| A. INDIKATOR UTAMA | | | | |
| NO | PERTANYAAN | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Jumlah Kantor Polisi Di Provinsi atau Kabupaten/Kota | | | |
| | A. Jumlah Polres/Polresta | | | |
| | B. Jumlah Polsek/Polsekt | | | |
| | C. Jumlah Pos Polisi | | | |
| 2. | Jumlah Personel Polisi Di Provinsi atau Kabupaten/Kota | | | |
| | A. Laki-Laki | | | |
| | B. Perempuan | | | |
| | C. Total | | | |
| 3. | Jumlah Kejahatan (<i>Crime Total</i>) <i>(Crime Total adalah jumlah seluruh kejahatan yang tercatat di Kepolisian pada satu tahun atau biasa disebut dalam data polisi Jumlah Laporan).</i> | | | |
| 4. | Jumlah Kejahatan Yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>) <i>(Crime Cleared adalah jumlah seluruh kejahatan yang diselesaikan oleh Kepolisian pada satu tahun).</i> | | | |
| 5. | Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (<i>Crime Rate</i>) <i>(Crime Cleared adalah Risiko Penduduk Terkena Kejahatan pada satu tahun). Cara Penghitungannya Jumlah Kejahatan (Crime Total) dibagi jumlah penduduk di wilayah tersebut)</i> | | | |

| B. JUMLAH KEJADIAN KEJAHATAN (LAPOR DAN SELESAI) TAHUN 2019 - 2020 | | | | | |
|--|---|-------|---------|-------|---------|
| NO | KELOMPOK KEJAHATAN | 2019 | | 2020 | |
| | | LAPOR | SELESAI | LAPOR | SELESAI |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Kejahatan terhadap Nyawa | | | | |
| 1 | Pembunuhan | | | | |
| | Kejahatan terhadap Fisik/Badan | | | | |
| 2 | Penganiayaan Ringan | | | | |
| 3 | Penganiayaan Berat | | | | |
| 4 | Kekerasan dalam Rumah Tangga | | | | |
| | Kejahatan terhadap Kesusilaan | | | | |
| 5 | Perkosaan | | | | |
| 6 | Pencabulan | | | | |
| | Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang | | | | |
| 7 | Penculikan | | | | |
| 8 | Mempekerjakan Anak Dibawah Umur | | | | |
| | Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan | | | | |
| 9 | Pencurian dengan Kekerasan | | | | |
| 10 | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi) | | | | |
| 11 | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam) | | | | |
| | Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang | | | | |
| 12 | Pencurian | | | | |
| 13 | Pencurian dengan pemberatan | | | | |
| 14 | Pencurian Kendaraan Bermotor | | | | |
| 15 | Pengrusakan/Penghancuran Barang | | | | |
| 16 | Pembakaran dengan Sengaja | | | | |
| 17 | Penadahan | | | | |
| | Kejahatan Terkait Narkotika | | | | |

| B. JUMLAH KEJADIAN KEJAHATAN (LAPOR DAN SELESAI) TAHUN 2019 - 2020 | | | | | |
|--|---|-------|---------|-------|---------|
| NO | KELOMPOK KEJAHATAN | 2019 | | 2020 | |
| | | LAPOR | SELESAI | LAPOR | SELESAI |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 18 | Narkotika dan Psikotropika | | | | |
| | Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi | | | | |
| 19 | Penipuan/Perbuatan Curang | | | | |
| 20 | Penggelapan | | | | |
| 21 | Korupsi | | | | |
| | Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum | | | | |
| 22 | Terhadap Ketertiban Umum | | | | |

| C. JUMLAH KORBAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2019 – 2020 | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| NO | KELOMPOK KEJAHATAN | 2019 | | 2020 | |
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Kejahatan terhadap Nyawa | | | | |
| 1 | Pembunuhan | | | | |
| | Kejahatan terhadap Fisik/Badan | | | | |
| 2 | Penganiayaan Ringan | | | | |
| 3 | Penganiayaan Berat | | | | |
| 4 | Kekerasan dalam Rumah Tangga | | | | |
| | Kejahatan terhadap Kesusilaan | | | | |
| 5 | Perkosaan | | | | |
| 6 | Pencabulan | | | | |
| | Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang | | | | |
| 7 | Penculikan | | | | |
| 8 | Mempekerjakan Anak Dibawah Umur | | | | |
| | Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan | | | | |
| 9 | Pencurian dengan Kekerasan | | | | |
| 10 | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senp) | | | | |
| 11 | Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam) | | | | |
| | Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang | | | | |
| 12 | Pencurian | | | | |
| 13 | Pencurian dengan pemberatan | | | | |
| 14 | Pencurian Kendaraan Bermotor | | | | |
| 15 | Pengrusakan/Penghancuran Barang | | | | |
| 16 | Pembakaran dengan Sengaja | | | | |
| 17 | Penadahan | | | | |
| | Kejahatan Terkait Narkotika | | | | |
| 18 | Narkotika dan Psikotropika | | | | |
| | Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi | | | | |
| 19 | Penipuan/Perbuatan Curang | | | | |
| 20 | Penggelapan | | | | |
| 21 | Korupsi | | | | |
| | Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum | | | | |
| 22 | Terhadap Ketertiban Umum | | | | |

SUMBER DATA:

- PROVINSI = POLDA
- KABUPATEN/KOTA = POLRES (Apabila Tidak Terdapat Polres Di Kab/Kota tersebut Diberi Keterangan)
- Data dapat diperoleh di:
 - Provinsi/Polda : Biro Operasi (Laporan Tahunan/Laporan Bulanan)
 - Kab/Kota/Polres : Bagian Operasi (Laporan Tahunan/Laporan Bulanan)

DATA MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
JALAN POROS WEDA-PAYAHE
EMAIL : BPS8202@BPS.GO.ID
WEBSITE : HTTP./HALTENGKAB.BPS.GO.ID**